

ABSTRAK

Nama : Hosianna Rugun Anggreni Rajagukguk
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Sikap Kritis Parlemen terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Resolusi DK PBB tentang Isu Nuklir Iran

Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia terkait isu nuklir Iran. Indonesia yang bergabung menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 turut mendukung resolusi nomor 1747 tahun 2007 tentang penjatuhan sanksi terhadap Iran untuk pengembangan nuklir Iran. Kebijakan luar negeri Indonesia ini mengundang perhatian di dalam negeri terutama dari pihak DPR RI yang berujung pada pengajuan hak interpelasi. Dalam Resolusi DK PBB nomor 1803 tahun 2008, Indonesia memilih untuk abstain. Penelitian ini ingin melihat apakah dan bagaimanakah sikap DPR turut menjadi faktor domestik yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memilih kebijakan luar negerinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI pasca reformasi memiliki wewenang untuk turut mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri Indonesia. Dalam kasus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai isu nuklir Iran, DPR telah menunjukkan perannya untuk terlibat di dalam proses yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia (KLNI) pada tahap tertentu, namun demikian faktor diplomasi bilateral yang dilakukan antara pemerintah Indonesia- Iran tetap menjadi faktor kunci.

Kata Kunci :
Kebijakan Luar Negeri, Parlemen, Nuklir Iran, Dewan Keamanan PBB

ABSTRACT

Name : Hosianna Rugun Anggreni
Study Program : Ilmu Hubungan Internasional
Title : Sikap Kritis Parlemen terhadap Kebijakan Luar Negeri
Indonesia dalam Kasus Resolusi DK PBB tentang Isu
Nuklir Iran

This thesis discusses Indonesian foreign policy on Iranian nuclear issue. Indonesia who was a non-permanent member of the United Nations Security Council in 2007 voted in favor for resolution number 1747 year 2007, imposing sanctions against Iran for its nuclear development. This has in turn triggered criticism, particularly from the Indonesian House of Representative (*DPR RI*) that resulted in interpellation. In the United Nations Security Council Resolution number 1803 year 2008, Indonesia decided to abstain. This research looks into whether and how the Parliament is constituting the so called domestic factors for the Government of Indonesia in determining its foreign policy. The research shows that the *DPR RI* post-reform era holds the power to influence Indonesian foreign policy and its international relations. In the case of Indonesian foreign policy on Iranian nuclear issue, *DPR RI* has shown its ever expanding role to be involved in the process of influencing Indonesian foreign policy to a certain extent. Nevertheless, bilateral diplomacy between the Government of Indonesia and Iran plays pivotal role.

Key Words:

Indonesian Foreign Policy, Parliament, Iranian Nuclear, UN Security Council